

ABSTRAK

Perselisihan dan keributan antar saudara dapat terjadi akibat pembagian harta warisan yang tidak adil. Ketidakadilan akan membawa para pihak bersengketa untuk menyelesaikan dengan cara kesepakatan atau dengan cara menempuh jalur hukum. Perselisihan dan keributan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Karo telah membuat suatu putusan Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961 yang menyatakan persamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam mewaris. Putusan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan hukum waris adat Batak Karo yang menganut sistem pewarisan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana anak laki-laki sajalah yang berhak atas harta warisan orang tuanya.

Di Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung hanya menentukan suatu hukum yang berlaku bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu perkara. Keputusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang diadili oleh putusan yang bersangkutan, dan tidak mengikat bagi orang lain yang bukan merupakan para pihak, sementara hukum waris adat Batak Karo dirasa kurang adil bagi kaum perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui latar belakang pemikiran hakim dalam memutus Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/SIP/1961, dan apa saja dampaknya bagi masyarakat Batak Karo serta efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961 dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Karo.

Lokasi penelitian adalah di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat Diskriptif Analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (Empiris Analitis Data) dilakukan dengan cara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan induktif-deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan dalam hukum waris adat Batak Karo khususnya terhadap anak perempuan sebagai ahli waris. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pembagian yang khusus dan kewajiban untuk memberikan pemberian kepada anak perempuan walaupun tidak sebanyak bagian anak laki-laki. Hasil penelitian sangat berguna dalam rangka penegakan hukum dalam pembagian warisan pada masyarakat Karo.

Kata Kunci : Efektivitas, Yurisprudensi, Hak Waris, Masyarakat Batak Karo.

ABSTRACT

Dispute and commotion among siblings may occur as a result of unfair inheritance distribution. Injustice will bring the parties to settle the dispute through such agreement or legal proceeding. Dispute and commotion in the inheritance distribution of the indigenous peoples of Batak Karo had made a Putusan Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961, dated on October 23, 1961 which states gender equality on heirs. Putusan Mahkamah Agung is in contradiction with customary inheritance law of Batak Karo which embracing patrilineal inheritance system, the system of descent drawn along the lines of the father, stating that the only male descendant who is entitled to be the heir.

In Indonesia, Putusan Mahkamah Agung only determines a law that applies to certain parties in certain case. The judges' decision is only binding for the parties have been convicted by the decision in question, and is not binding for other people who are not the parties, while the inheritance law of Batak Karo is seemed to be unfair for women. Concerning the aforesaid issues, it is necessary to investigate the judge's consideration in deciding the Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961, and what kind of implications being brought to Batak Karo society and the effectiveness of Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961 in the inheritance distribution in indigenous people of Batak Karo.

This research was conducted in Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, North Sumatra. This study was Descriptive Analysis study using sociological juridical approach (Empirical Analytical Data) done by means of qualitative and conclusion made by the inductive-deductive approach.

The results showed that there has been enhancement in the customary inheritance law of Batak Karo, particularly against women as heiress. This can be evidenced by the special division and the obligation to give a gift to their daughter although not as much as their son. The results of the study are very useful in the context of inheritance law enforcement in the Karo peoples.

Keywords: Effectiveness, Jurisprudence, Inheritance Rights, People of Batak Karo